

TANTANGAN DAN PROSPEK KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN

Zuchri Abdussamad
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Abstraksi. Setelah 60-an tahun lamanya Indonesia merdeka, maka bangsa ini telah beritikad dan bertekad untuk melakukan perbaikan dan pembangunan disegala sisi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selama itu juga, bangsa Indonesia telah berada dalam kungkungan rezim yang belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, yaitu orde lama dan orde baru. Setelah Reformasi 1998 yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto dari prambanan kepresidenan, maka bangsa Indonesia telah berada pada sebuah titik terang dalam melakukan pembaharuan dan perbaikan disegala sisi kehidupan kenegaraan. Perubahan yang terjadi di semua lini baik struktur dan budaya politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan sebagainya telah mempengaruhi berbagai sendi lainnya salah satunya adalah dalam hal komunikasi politik pemerintah dengan rakyatnya.

Kata-kata Kunci: rezim, reformasi, dan komunikasi politik

Universalisasi sistem nilai global yang terjadi dalam dimensi kebudayaan melalui invasi media massa dan teknologi komunikasi telah mengaburkan sistem nilai (values system) kehidupan manusia, khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Era globalisasi yang ditandai revolusi komunikasi dan informasi telah menjadikan dunia menjadi tanpa batas dan sekat. Kapitalisme global merupakan salah satu implikasi dari perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus sebagai bentuk imperialisme negara-negara maju terhadap negara dunia ketiga. Tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban modern mengandung pengaruh positif bagi bangsa manapun terutama terkait dengan sektor sains dan teknologi. Namun dampak negatifnya juga besar yaitu imbas nilai-nilai dan gaya hidup di era milenium sesuai dengan semangat, muatan dan substansi yang terkandung didalamnya. Imbas nilai-nilai baru tersebut dapat merubah pola nilai masyarakat berupa pergeseran secara evolutif yang menimbulkan berbagai degradasi pemikiran maupun perbuatan.

Komunikasi Politik

Hovland (dalam Hasan 2005:17) mengemukakan *...communication is the process by which an individual transmits stimuli usually verbal to modify the behavior of other individuals...*”.

Everett M. Rogers (dalam Nurudin, 2005:26) berpendapat bahwa komunikasi adalah proses hal mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih bermaksud mengubah perilaku”. Definisi ini menekankan bahwa dalam komunikasi ada sebuah proses pengoperan (pemrosesan) ide, gagasan, lambang, dan di dalam proses itu melibatkan orang lain.

Selanjutnya Kincaid (dalam Hasan, 2005:17) mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Siporin (dalam Hasan, 2005:17), bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi/mengirim, menerima dan menanggapi pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi.”

Sedangkan oleh Myers & Miyers (dalam Hasan, 2005:17) mengemukakan bahwa komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir.

Laswell (dalam Nurudin, 2005:15) mengungkapkan beberapa fungsi komunikasi yaitu:

1. Penjagaan/pengawasan lingkungan (*surveillance of the environment*).
2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya (*correlation of the part of society in responding to the environment*); dan
3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya (*transmission of the social heritage*)

Erliana Hasan (2005:22) mengemukakan beberapa fungsi komunikasi, yaitu:

1. Mencapai pengertian satu sama lain;
2. Membina kepercayaan;
3. Mengkoordinir tindakan;
4. Merencanakan strategi;
5. Melakukan pembagian pekerjaan;
6. Melakukan aktivitas kelompok; dan
7. Berbagi rasa.

Selanjutnya Robbins (dalam Erliana Hasan, 2005:23) mengungkap-kan empat fungsi utama komunikasi, yaitu:

1. Fungsi pengawasan;
2. Fungsi motivasi
3. Fungsi pengungkapan emosional;
4. Fungsi informasi.

Dari pengertian dan fungsi-fungsi komunikasi di atas, maka komunikasi merupakan bagian integral dari fungsi organisasi apapun termasuk lembaga-lembaga pemerintahan dalam melayani dan memberdayakan masyarakat.

Sedangkan Dahl dalam Arifin (2003) berpandangan bahwa politik adalah aturan, kekuasaan, pengaruh, wewenang, dan pemerintahan sebagai cakupan politik. Oleh Rush dalam Arifin (2003) mengemukakan bahwa kekuasaan dapat dipandang sebagai titik sentral studi politik sehingga proses politik adalah seperangkat peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan.

Pembicaraan Politik menurut Bell dalam Arifin (2003:3) adalah pembicaraan kekuasaan, pembicaraan pengaruh dan pembicaraan otoritas. Nimmo (1999:82) menambahkan lagi bahwa pembicaraan dalam politik yaitu pembicaraan tentang konflik, karena melalui pembicaraan politik para komunikator politik menyelesaikan perselisihan-perselisihan mereka kendatipun tidak pernah menyeluruh.

Sedangkan para pakar ilmu politik, seperti Almond dan Powell dalam Arifin (2003) justru menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik. Bahkan menurut kedua pakar tersebut, justru komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi lain.

Dalam perspektif berbeda, Nimmo (2005), memandang bahwa komunikasi merupakan proses interaksi sosial dan inti politik sebagai konflik sosial. Sehingga ia merumuskan bahwa komunikasi politik sebagai kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial, yang menata perilaku dalam kondisi konflik.

Prospek Komunikasi Politik Indonesia

Proses komunikasi politik yang sebelumnya otokratif dan terpusat pada masa rezim orde baru beralih ke proses komunikasi politik yang demokratis, terbuka dan terdesentralisasi/otonom. Sehingga secara substantif, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam komunikasi politik. Sejak

reformasi 1998 hingga saat ini, komunikasi politik yang berada bangsa Indonesia mendapatkan secercah harapan baru akan perubahan yang lebih baik. Sebab telah terjadi pembaharuan dan perbaikan disegala sisi kehidupan Indonesia terutama dalam lingkup kebebasan mengemukakan pendapat, mengkritisi dan dikritisi. Pemerintah dan seluruh perangkat pemerintah lainnya dituntut untuk selalu transparan, mengikutsertakan masyarakat memberikan pelayanan yang adil dan merata. Sehingga, prospek komunikasi politik di Indonesia di antara negara-negara kesejahteraan sangat memungkinkan baik pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam.

Berikut ini akan dibahas prospek komunikasi politik Indonesia di lihat dari berbagai bidang yakni sebagai berikut:

a. Bidang Politik

Pasca reformasi 1998, kondisi politik Indonesia mengalami pembaharuan yang cukup berarti baik dalam hal pengambilan kebijakan, keikutsertaan rakyat, pengawasan serta tingkat pengawasan masyarakat. Prospek komunikasi politik Indonesia saat ini dapat dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Pemilihan kepemimpinan

Apabila pada masa orde baru, pemilihan kepala pemerintahan dilakukan oleh para penguasa yang berada di parlemen, maka setelah reformasi 1998, pemilihan kepala negara dilakukan langsung oleh rakyat. Demikian juga dengan pemilihan kepada daerah, yang sebelumnya ditentukan oleh pimpinan negara, akan tetapi saat ini harus mendapat dukungan dan legitimasi secara langsung oleh rakyat/masyarakat yang ada didaerahnya melalui PILKADA. Hal ini menuntut seorang politisi dapat membangun komunikasi politik yang intensif guna membentuk citra diri, pendapat umum, sosialisasi serta dukungan secara langsung yang diwujudkan dalam pemilihan umum ataupun PILKADA.

2. Perumusan Kebijakan

Pada masa rezim orde baru, perumusan kebijakan dilakukan secara terpusat dan tertutup, maka saat ini, perumusan kebijakan harus mengikutsertakan masyarakat melalui berbagai stakeholder. Masyarakat melalui berbagai stakeholder juga ikut mempertimbangkan, memberikan masukan yang bersifat konstruktif atas segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ataupun badan legislatif.

3. Pelaksanaan Kebijakan

Setelah suatu kebijakan ditetapkan, maka pemerintah diminta untuk selalu transparan, dan publik juga ikut mengontrol pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga, media massa yang sebelumnya dalam kungkungan pemerintah, dapat dengan independen dan objektif memberikan informasi tentang berbagai perkembangan ataupun penyelewengan dalam penyelenggaraan kebijakan oleh pemerintah. Masyarakat memiliki andil yang besar dalam implementasi kebijakan, oleh karena itu, komunikasi publik dalam konteks sosialisasi dan sebagainya harus terus dibangun oleh pemerintah dan rakyatnya.

4. Evaluasi

Apabila pada masa orde baru, segala perkembangan akhir kebijakan pemerintah sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat, maka saat ini masyarakat juga memiliki andil yang cukup besar untuk melakukan evaluasi atas seberapa besar keberhasilan yang telah diraih oleh pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakannya. Dan hal ini dapat diespresikan baik dalam bentuk ucapan (lisan/tulisan) ataupun tindakan.

b. Dalam Bidang Sosial Budaya

Pelaksanaan komunikasi politik yang semakin terbuka, memberikan beberapa prospek yang cukup baik dalam kehidupan masyarakat, yaitu: *Pertama*, budaya feodalisme yang masih kental di masyarakat Indonesia sehingga berakibat pada sakralisasi pimpinan pusat dan daerah dengan kentalnya kepemimpinan paternalistik sebelumnya secara berangsur-angsur berubah ke arah demokrasi. *Kedua*, masyarakat Indonesia yang sebelumnya masih canggung dengan kritik terhadap pimpinan, telah bergeser ke budaya terbuka, bebas mengkritik dan memberikan masukan kepada pimpinan. *Ketiga*, budaya masyarakat yang sebelumnya bersifat menunggu untuk diberi beralih kepada budaya untuk dapat mandiri dan memiliki etos dan produktivitas kerja.

c. Dalam Bidang Ekonomi

Pasca reformasi 1998, terjadi perubahan yang cukup berarti dalam strategi pembangunan Indonesia. Dari yang terpusat ke sistem otonom, sehingga secara otomatis komunikasi politik maupun proses pembangunan mengalami perubahan yang cukup berarti. Komunikasi politik yang terbuka memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Secara nasional, bangsa Indonesia diperhadapkan pada permasalahan keadilan dan pemerataan pembangunan serta pemberdayaan

masyarakat yang pada masa orde baru tidak diperhatikan dan dilaksanakan dengan maksimal sehingga berujung pada diintegrasikan bangsa. Oleh karena itu pola komunikasi yang sebelumnya terpusat di pemerintah pusat, kemudian diperpendek ke pemerintah daerah dengan adanya pelaksanaan pembangunan secara desentralisasi dan otonom.

Komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat saat ini memiliki prospek yang sangat baik dalam melangsungkan prosesi pembangunan lokal maupun nasional dengan jalan mendengar dan mengakomodir segala tuntutan dan keluhan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tuntutan dan keluhan itu kemudian dirumuskan ke dalam berbagai program dan strategi pembangunan yang dilakukan secara *bottom-up* melalui musyawaran rancangan pembangunan (MUSREMBANG), yang dimulai pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota.

Para politisi dan pemerintah dalam setiap agendanya, agar tetapi mendapat dukungan dan legitimasi masyarakat, maka dituntut untuk membuka komunikasi yang intensif, menyaring aspirasi dan tuntutan masyarakat serta memberikan pelayanan yang baik. Selain itu, untuk mendukung proses pembangunan ekonomi, maka pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah dan para politisi dalam membangun sebuah masyarakat madani (*civil society*). Sebab saat ini masyarakat tidak lagi dijadikan sekedar sebagai objek pembangunan, akan tetapi subjek yang turut diberdayakan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

d. Dalam Bidang Teknologi

Awalnya, “politik di internet” hanyalah angan-angan tak jelas, tetapi dalam jangka waktu setengah dasawarsa angan-angan itu telah berkembang menjadi peristiwa rutin yang hampir tak dapat diabaikan pelaku politik dan masyarakat sipil. Semua dimensi politik terangkum dalam internet, yakni:

- politik (sebagai *policy*) dibuat untuk jaringan komunikasi ini yang sayangnya tidak dapat diatur dan diawasi seperti yang diharapkan (atau yang dikhawatirkan);
- politik (sebagai *politics*) juga terjadi di internet, ini berarti persaingan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh semakin meningkat dengan adanya jaringan komunikasi ini;
- terakhir adalah masalah *netzpolitik* (sebagai *polity*) tentang pengaruh perubahan media terhadap konstitusi dan keterbentukan negara-negara demokrasi modern tentang arsitektur internet itu sendiri yang sama

sekali “bukan ruang yang bebas dari kekuasaan” seperti yang dijanjikan.

Perubahan media ini dikaitkan dengan harapan-harapan, terutama sekali harapan akan pembaharuan “demokrasi langsung ala Athena” (Al Gore). Namun, adanya perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan, yakni munculnya “populisme elektronik” yang membahayakan demokrasi liberal. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman yang telah dilewati sampai saat ini kedua masalah ini tidak perlu dipersoalkan. Sebaliknya, dalam melakukan komunikasi politik yang selama ini penelitiannya tidak pernah melibatkan media baru (internet) secara sistematis, kita seharusnya melepaskan posisi-posisi yang terlalu ditentukan faktor teknik (*technik determinisch*) dan yang tidak memihak teknik (*technik indifferent*). Itu berarti harus ada perubahan dalam mengembangkan politik. Media bukanlah satu-satunya faktor, sementara gaya lama, “*politics as usual*”, tidak lagi sesuai dengan jaman.

Kekecewaan disebabkan hasil perdagangan elektronik dan harapan-harapan “*New Economy*” yang hancur berantakan juga mendukung proses pengembangan komunikasi politik melalui online (internet) yang selama ini kurang diperhatikan di dunia cyber. Terlepas dari semua propaganda dan kritik budaya yang selalu dihubungkan dengan inovasi teknik, terbukti bahwa perubahan radikal kehidupan sosial yang dipicu oleh komunikasi online ini juga menjamah kehidupan politik.

Tantangan Komunikasi Politik Indonesia di Negara Kesejahteraan

Mengukur kenyamanan ekonomi dengan perbandingan harga barang kebutuhan pokok hari ini dan harga barang sejenis tujuh tahun lalu, sebelum krisis menghempaskan perekonomian negeri ini, tentu menyedihkan. Tanpa kekeliruan parameter seperti itu, Taufik Kiemas meyakini kinerja perekonomian kabinet yang dipimpin istrinya, presiden Megawati Soekarnoputri, sudah cukup cemerlang di tengah segala keterbatasan dan tekanan kondisi yang ada.

Akan tetapi, anjloknya perolehan suara Partai Semokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) yang juga diketuai megawati menyuguhkan kenyataan yang berbeda. Beragam survei seputar pemilihan umum (Pemilu) 2004 yang meyakinkan kinerja perbaikan ekonomi masih merupakan poin terpenting dalam penilaian yang diberikan masyarakat melalui mekanisme pemilu. Artinya, perolehan suara jeblok berarti nilai buruk bagi kinerja kabinet.

Harapan rakyat yang diberikan kepada pemerintahan Megawati bisa jadi sangat tinggi dan tak lepas dari budaya politik yang menuntut seorang pemimpin mesti mampu menyulap keadaan. Namun, kompromi antara harapan dan realitas bukan tak mungkin dibangun melalui komunikasi politik yang baik, kompromi itu dapat diwujudkan.

Penyelesaian kemelut daerah konflik, misalnya, tidak dapat dibaca dari teriakan bahwa PDI-P menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di atas sejumlah panggung kampanye partai "moncong putih" itu. Teriakan juru kampanye tentang keutuhan NKRI itu nyaris terdengar seperti tempelan bagi suguhan hiburan musik dangdut di atas panggung kampanye. "Pemilu ini menunjukkan masyarakat Indonesia mampu memberi penilaian, tak sebodoh yang dikira sebagian elite politik negeri ini," kata pengamat politik Indonesia, R William Liddle, dari Universitas Negara Bagian Ohio, Columbus, AS.

Artinya, dibutuhkan kampanye yang lebih cerdas. Berkaitan dengan program riil perekonomian, misalnya, masyarakat perlu memahami bagaimana rencana penciptaan lapangan kerja. Sayangnya, masih belum jelas, apakah ini perkara ketiadaan konsep perencanaan atau ketidakmampuan mengomunikasikannya.

Kegagalan komunikasi politik bukan cuma dialami Megawati. Peneliti dari Center For Strategic and International Studies (CSIS), Indra J Piliang, mengamati bahwa upaya ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dalam meraih suara pemilih muda melalui kunjungan ke markas grup musik Slank dan para slankers (penggemar grup musik itu) di gang potlot, Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan bentuk komunikasi yang tidak efektif. Kesenjangan generasi tidak bisa dijabatani ketika Amien datang pada mereka dan berceramah di sana.

"Sebaliknya, para Slankers ini justru cenderung memberikan simpati kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang langsung mengemas pesan untuk mereka dengan bahasa politik populer dalam iklan televisi dan sapaan anak muda bergaya gaul," kata Piliang.

Artinya, pesan politik disampaikan oleh komunikator yang tepat untuk sasaran segmen tertentu. Dalam budaya populer yang berkembang saat ini, pencitraan menjadi lebih penting daripada aliran bagi sebagian kalangan. Televisi memastikan masyarakat pedesaan di segenap pelosok negeri ini tak ketinggalan informasi politik. Liddle yang mengikuti penyelenggaraan pemilu anggota dewan legislatif 5 April 2007 di desa Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, menemukan beragam opini warga desa terbentuk seputar perkembangan situasi politik nasional. Mereka antara lain

tegas mengidentifikasi ucapan Taufik Kiemas tentang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai penghinaan.

Sebaliknya, SBY ngetop melalui pemberitaan daerah konflik sebagai sosok yang dinilai masyarakat broso sabar, kalem, dan berwibawa. Ia dipandang seperti figur priayi Jawa. "penilaian karakter seperti itu sebenarnya lebih mudah diberikan, justru karena SBY belum cukup berbuat banyak untuk dikenali," kata Liddle.

Dalam komunikasi politik, dikenal adanya kampanye negatif. Pada kasus SBY, seakan dilupakan bahwa dia adalah bagian dari pemerintahan Megawati sampai Maret lalu. Belum tuntasnya persoalan besar yang berada dalam kewenangan SBY sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan, yakni kemelut daerah-daerah konflik, misalnya, bisa diungkit dalam kampanye negatif sebagai kelemahan SBY.

Ketika keluar dari kabinet Mega, SBY seakan-akan dipandang sebagai pembawa perubahan baru. Liddle menjelaskan hal ini sebagai konsekuensi dari sebuah kabinet presidensial, yakni memusatnya tuntutan dan pertanggungjawaban kinerja kabinet pada presiden, bukan pada masing-masing menternya.

Piliang memperhitungkan posisi Megawati saat ini sepatutnya justru lebih kuat daripada posisi Megawati menjelang pemilu 1999. "tahun 1999 Mega dipandang sebagai 'korban' dan diam. Tahun 2004 Mega mempunyai kekuasaan sebagai presiden, dapat dilihat kinerjanya serta organ partai yang lebih bekerja," katanya. "artinya, PDI-P sekarang punya pilihan-pilihan SDM (sumber daya manusia) yang dapat membangun dukungan."

Masalahnya, tak mudah membedakan apakah kemarahan politik yang menyebabkan perolehan suara PDI-P di berbagai daerah merosot tersebut dikarenakan kemarahan terhadap Mega atau kemarahan terhadap "orang-orang" Mega yang berkinerja buruk, bahkan bertindak koruptif.

Satu hal yang ditegaskan wakil sekretaris jenderal Dewan Pengurus Pusat PDI-P Pramono Anung, pemilih yang memberikan suara untuk PDI-P pada pemilu legislatif lalu diyakininya sebagai massa riil partai ini. Dengan kata lain, Megawati diyakini bermodal partai yang terstruktur cukup kuat dan luas. Berbeda dengan pemilih partai demokrat, misalnya, yang diasumsikan berasal dari kalangan massa mengambang yang belum terbentuk solid.

Untuk meningkatkan daya jual pada pencalonan presiden, citra positif mendesak dikembangkan. Bukan hanya the amien Rais Center yang bergerak kian aktif, Mega Center pun dibentuk. Melalui pencitraan positif, diharapkan masyarakat dapat memandang langsung sosok Megawati serta

menyisihkan ingatan tentang kinerja anggota-anggota dewan legislatif PDI-P lima tahun terakhir.

Menurut Piliang, pembentukan mega center dalam upaya kampanye politik merupakan langkah tepat. Pada pemilihan presiden secara langsung yang menjual figur, institusi semacam itu relatif independen dan berpotensi menjadi pijakan yang lebih kuat daripada partai. Komunikasi dan jaringan aliansi strategis pada saat ini, misalnya, lebih luwes dibangun di luar jalur partai. Hanya saja, sampai saat ini, belum jelas seperti apa formasi Mega Center dan apa yang akan dibuat oleh institusi ini.

Satu catatan penting, pencitraan adalah perkara pengemasan untuk mengontrol daya jual. Artinya, substansi menjadi perkara lain. Sejauh ini partai demokrat, misalnya, dicitrakan dengan baik oleh SBY. Namun, masyarakat masih bertanya-tanya bagaimana muatan substansial dalam visi misi partai ini. Di sisi lain, kapasitas pribadi calon presiden menjadi substansi yang mutlak dibutuhkan untuk menjawab tantangan masa depan pemerintahan.

Liddle menegaskan, konteks fragmentasi partai makin meluas dalam sistem politik Indonesia saat ini. Hasil pemilu legislatif lalu menunjukkan siapa pun yang menjadi presiden akan menghadapi tantangan lebih besar dalam meraih dukungan parlemen sepanjang masa kerja kabinet. Meskipun kabinet presidensial, parlemen berperan besar dalam pembuatan Undang-undang dan Anggaran.

Pertimbangan tipologi karakter pasangan calon presiden dan calon wakil presiden harus juga diimbangi pertimbangan karakter kabinet yang akan dibentuk nantinya. Menurut Piliang, komposisi, platform, dan aliran pemikiran kabinet yang dibentuk mesti dihitung untuk mengukur kemampuan mengendalikan birokrasi, menghadapi "raja-raja" lokal, terlebih lagi setelah pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Figur pemimpin nasional dan kabinet bukan hanya harus mampu memberi perintah yang jelas kepada jaring birokrasinya di bawah, tetapi juga mampu bernegosiasi secara politik dengan kepala-kepala daerah yang juga mempunyai mandat penuh dari rakyat di daerahnya," kata Piliang. Begitulah, citra diri mesti dibentuk dengan komunikasi politik yang baik. Sementara kapasitas substansial dibangun sepanjang perjalanan karier politik.

PENUTUP

Banyak jenis politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, sama dengan banyaknya politikus, tetapi untuk mudahnya kita klasifikasikan mereka sebagai (1) di dalam atau di luar jabatan pemerintah, (2) pandangan nasional atau subnasional, (3) berurusan dengan masalah berganda atau masalah tunggal. Dalam melukiskan keragaman komunikasi yang digunakan oleh para politikus ini sebaiknya dibatasi fokusnya pada politikus multimasalah tahap nasional, di dalam dan di luar jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Oleh sebab itu orang-orang politik mengklaim “politik sebagai panglima”. Kelompok lain menganggap politik maha penting karena segalanya ditentukan oleh politik. Pentingnya konsep modernisasi ialah untuk mencegah terjadinya pertarungan antara kelompok, yang satu dengan yang lainnya akibat rasa diri paling penting, juga untuk menjaga jangan sampai terjadi benturan-benturan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar. 2003, *Komunikasi Politik, Paradigma-teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Hasan, Erliana, 2005, *Komunikasi Pemerintahan*. Refika Aditama, Bandung.
- Nurudin. 2005, *Sistem Komunikasi Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nimmo, Dan, 2005, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Piliang Indra J, 2007, *Jurnal Center For Strategic and International Studies (CSIS)*